



**RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2017 - 2021**



**RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2017-2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis BKD Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021. Didalamnya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan serta pendanaan indikatif selama kurun waktu lima tahun.

Penyusunan Renstra BKD ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan mengakomodir kegiatan dari para *stakeholder*, baik dari internal BKD Kabupaten Blora, maupun usulan dari masyarakat. Namun demikian, urusan kepegawaian yang merupakan urusan penunjang pelaksanaan pemerintah daerah, lebih didominasi usulan kegiatan dari internal BKD Kabupaten Blora sehingga lebih bersifat teknokratik.

Disamping itu, urusan kepegawaian merupakan *mix system* antara kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karenanya, beberapa tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikatornya meratifikasi apa yang telah ditetapkan oleh instansi terkait, Badan Kepegawaian Negara atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga secara prosedural, perencanaan *top down* menjadi alternatif lainnya.

Semoga Rencana Strategis ini memberikan arah sekaligus batasan yang jelas bagi penyusunan rencana kerja perangkat daerah sehingga terwujud sinergitas dan kontinuitas program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blora.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-6
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-8
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-3
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-5
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-5
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tugas dan Fungsi Sub Bagian / Sub Bidang	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Aparatur BKD Kabupaten Blora.....	II-7
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kab. Blora	II-10
Tabel 3.1	Identifikasi permasalahan berdasarkan Tusi	III-1
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	IV-2
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2017-2021	V-1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD mengacu RPJMD	VII-2

DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKD Kab. Blora II-3

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
BLORA TAHUN 2017-2021

**RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Strategis BKD Kabupaten Blora merupakan rencana kerja yang dituangkan dengan indikator kinerja untuk lima tahun. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja BKD Kabupaten Blora akan menjadi salah satu parameter pencapaian target RPJMD. Dalam pembagian urusannya BKD Kabupaten Blora membidangi urusan kepegawaian yang menjadi salah satu dari delapan penunjang urusan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora tahun 2017-2021 berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

- Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun (2017-2021),

sebagai tolok ukur kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Tujuan:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Blora dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan di bidang kepegawaian;
2. Memberikan acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora tahun 2017 hingga tahun 2021;
3. Memberikan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra BKD Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pertama kali dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Blora, kemudian mengalami Perubahan pada Tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora. Namun, dalam perubahan ini, tidak terjadi perubahan struktur organisasi BKD Kabupaten Blora. Selanjutnya, perubahan terakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora. Dalam aturan ini, BKD Kabupaten Blora terklasifikasikan dalam Tipologi SKPD dengan Tipe “B”. Hal ini berpengaruh terhadap susunan organisasi yang mengalami penyederhanaan dari semula berjumlah empat bidang dan satu sekretariat, kini berjumlah tiga bidang dan satu sekretariat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora memiliki tugas dalam kebijakan teknis dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Manajemen kepegawaian merupakan unsur penunjang pelaksanaan pemerintah daerah yang meliputi proses penyusunan formasi dan rekrutmen, mutasi, diklat, gaji/tunjangan/kesejahteraan, ketatausahaan kepegawaian, disiplin dan pengendalian kepegawaian serta pemberhentian. Instrumen strategis tersebut, beririsan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Blora, khususnya misi pertama, yaitu **“Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis,**

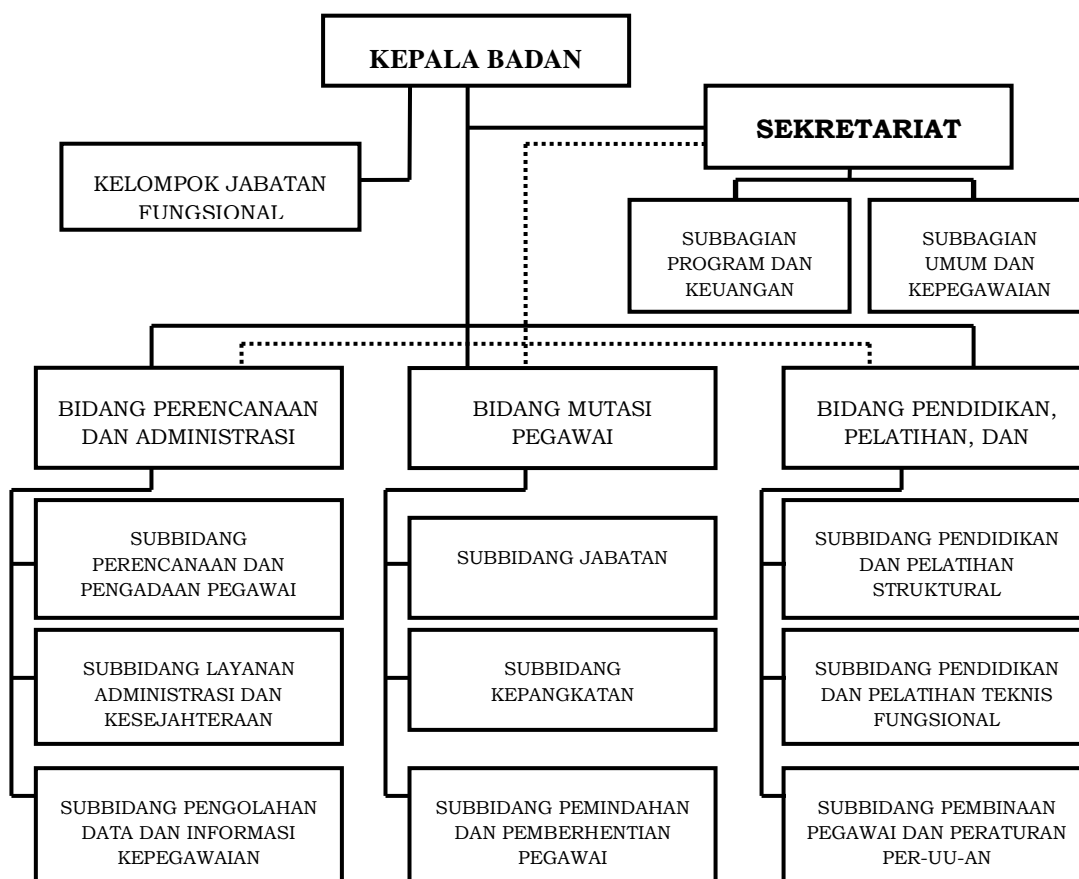
melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.” Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian senantiasa mendasarkan pada efektifitas, demokratis, adanya pembaharuan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Dalam mengemban tugas tersebut, secara kelembagaan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan dan Administrasi Pegawai, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Layanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.
- d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:
 1. Sub Bidang Jabatan;
 2. Sub Bidang Kepangkatan;
 3. Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.
- e. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Pegawai, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan
 3. Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Jika diilustrasikan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan 2.1 Struktur Organisasi BKD Kabupaten Blora



Secara ringkas, tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Bagian / Sub Bidang berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Sub Bagian/Sub Bidang

NO	SUB BAGIAN / SUB BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI
1	Sub Bagian Program dan	1. Menyusun rencana program/kegiatan berdasarkan usulan dari bidang / sekretariat;

NO	SUB BAGIAN / SUB BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI
	Keuangan	2. Memantau dan mengevaluasi kegiatan bidang guna mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan; 3. Menyusun rencana anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 4. Mengelola keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi; 5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan BKD Kabupaten Blora.
2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Mengelola korespondensi dan kearsipan BKD Kabupaten Blora; 2. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, serta pelaporan sarana dan prasarana BKD Kabupaten Blora; 3. Melaksanakan administrasi kepegawaian internal BKD Kabupaten Blora; 4. Melaksanakan pelayanan urusan hukum, kehumasan, dan organisasi BKD Kabupaten Blora.
3	Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai	1. Menyusun rencana kebutuhan pegawai dan teknis pengadaan pegawai; 2. Menyiapkan bahan seleksi dan pengangkatan pegawai; 3. Memproses penetapan Nomor Induk PNS (NIP); 4. Memproses usulan karpeg, kartu tabungan, asuransi pensiun, dan kartu jaminan kesehatan.
4	Sub Bidang Layanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai	1. Memproses usulan kartu isteri/suami; 2. Memonitoring dan melaporkan pajak-pajak pribadi PNS; 3. Memproses usulan pemberian penghargaan, kenaikan gaji berkala dan cuti; 4. Menyiapkan bahan pelayanan dana tabungan perumahan dan jaminan kecelakaan kerja.
5	Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	1. Mengelola basis data kepegawaian; 2. Mengelola aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); 3. Mengelola dan memelihara arsip kepegawaian;

NO	SUB BAGIAN / SUB BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI
		4. Melaksanakan penyajian dan pertukaran informasi; 5. Mengelola informasi, dokumentasi dan publikasi kegiatan.
6	Sub Bidang Jabatan	1. Memproses mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional; 2. Memproses usulan penunjukan PNS sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas; 3. Merumuskan standar kompetensi pegawai, penilaian kompetensi dan pengelolaan hasil penilaian kompetensi dan potensi pegawai; 4. Menyusun pola karier PNS.
7	Sub Bidang Kependidikan	1. Menyusun rencana teknis mutasi kenaikan pangkat PNS; 2. Memproses usulan penetapan Kenaikan Pangkat PNS; 3. Memproses usulan pemberian izin belajar dan tugas belajar PNS; 4. Memproses usulan pemberian keterangan belajar, izin penggunaan gelar, pelaksanaan ujian dinas, peningkatan pendidikan dan penyesuaian ijazah PNS; 5. Memproses usulan peninjauan masa kerja PNS.
8	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	1. Menyusun teknis pemindahan dan pemberhentian pegawai; 2. Memproses usulan pemindahan pegawai dalam dan antar perangkat daerah; 3. Memproses usulan pemberian izin pencalonan kepala desa dan perangkat desa bagi PNS; 4. Memproses usulan pemberhentian dan pengangkatan kembali dari dan dalam jabatan struktural/fungsional; 5. Memproses penetapan pemberhentian pegawai; 6. Memproses penetapan pemberian pensiun PNS/janda/duda/bagian pensiun janda/duda;

NO	SUB BAGIAN / SUB BIDANG	TUGAS DAN FUNGSI
		7. Memproses usulan dana tunjangan hari tua dan jaminan kematian.
9	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan atau melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; 2. Merencanakan dan atau melaksanakan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS.
10	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan atau melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional; 2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
11	Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan asistensi pengukuran Sasaran Kerja Pegawai; 2. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja dan disiplin PNS; 3. Memproses penyelesaian pelanggaran disiplin PNS, status dan sengketa kepegawaian; 4. Memproses usulan izin perkawinan atau perceraian PNS; 5. Melaksanakan pembinaan jasmani dan mental PNS; 6. Menyusun rancangan peraturan kepegawaian.
12	Kelompok Jabatan Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Komputer Tugas pokoknya adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer 2. Analis Kepegawaian Tugas pokoknya adalah melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah PNS BKD Kabupaten Blora per 1 Januari 2018 berjumlah 44 orang tanpa memiliki pegawai Non PNS. Pegawai terdiri dari 15 PNS dalam jabatan struktural dan 29 PNS dalam jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu. Keterisian jabatan struktural belum 100% atau terjadi kekosongan jabatan Kepala BKD. Namun disisi lain, secara umum, jumlah staf relatif cukup.

Bilamana suatu kegiatan membutuhkan partisipasi lebih banyak pegawai, maka kebijakan yang diambil adalah melibatkan pegawai pada bidang maupun bagian lain guna memperlancar pelayanan BKD Kabupaten Blora. Disamping itu, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah adalah *zero growth*, maka distribusi pegawai dilaksanakan penuh pertimbangan sehingga diharapkan terwujud efektivitas dan efisiensi pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah aparatur BKD Kabupaten Blora

No	Jabatan*	PNS Golongan (orang)		
		IV	III	II
1	Kepala			
2	Sekretaris	1		
3	Kepala Bidang Mutasi Pegawai	1		
4	Kepala Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Pegawai	1		
5	Kepala Bidang Perencanaan dan Administrasi Pegawai	1		
6	Kepala Sub Bagian Program Keuangan		1	
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1	
8	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai		1	
9	Kepala Sub Bidang Layanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai		1	
10	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian		1	

No	Jabatan*	PNS Golongan (orang)		
		IV	III	II
11	Kepala Sub Bidang Jabatan		1	
12	Kepala Sub Bidang Kepangkatan		1	
13	Kepala Sub Bidang Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai		1	
14	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural		1	
15	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional		1	
16	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Peraturan Perundang-undangan		1	
17	Administrasi Kepegawaian		4	
18	Administrasi Umum		13	4
19	Analisis Kepegawaian		1	
20	Analisis Perencanaan SDM		1	
21	Pranata Komputer		1	1
22	Petugas Keamanan			3
23	Pengemudi			1
Jumlah		4	29	11
Total		44		

Sumber : BKD Kabupaten Blora, 2018, diolah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayan BKD Kabupaten Blora dalam Rencana Strategis periode pertama Tahun 2011 s.d 2015, menitik beratkan pada pelayanan prima Bidang kepegawaian dan kediklatan dengan 6 (enam) tujuan:

1. Memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai;
2. Mewujudkan penataan pegawai sesuai jabatan kompetensinya dan syarat jabatan serta memperhatikan pola karier;
3. Mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan Tupoksi yang dilaksanakan;

5. Meningkatkan Pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas, reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai;
6. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Enam program tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Lebih rinci, capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora (Tabel TC-23)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Tar get SP M	Tar get IK K	Tar get Ind ika tor Lai nnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai, Terwujudnya penataan pegawai sesuai jabatan kompetensinya dan syarat jabatan serta memperhatikan pola karier.																			
1	Tersedianya CPNS guna memenuhi kekurangan PNS	CPNS				215	8	550	676	0	206	8	0	652	0	95,81%	100,00%	0,00%	96,45%	#DIV/0!
2	Terlaksanakannya seleksi administrasi calon praja IPDN	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Tersedianya daftar formasi kebutuhan PNS	buah Laporan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Mewujudkan penataan pegawai sesuai jabatan kompetensinya dan syarat jabatan serta memperhatikan pola karier																			
4	Tertatanya sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	SK KP				1600	1900	1900	1610	1500	1880	1569	1850	1617	1500	117,50%	82,58%	97,37%	100,43%	100,00%
5	Adanya data Calon Pejabat Struktural	kali sidang				6	14	20	16	16	6	14	20	16	6	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	37,50%
6	Adanya seleksi calon pimpinan tinggi pratama	kali				0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Tar get SP M	Tar get IK K	Tar get Ind ika tor Lain nya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Terisinya Jabatan Struktural dan Fungsional		kali pelantikan			8	7	7	5	3	8	6	5	4	1	100,00%	85,71%	71,43%	80,00%	33,33%
8	Terwujudnya Tertib Administrasi Mutasi Pegawai		SK Pemberhentian			250	400	399	285	250	256	347	426	265	238	102,40%	86,75%	106,77%	92,98%	95,20%
			SK Pemindahan			400	450	450	250	200	435	547	339	181	200	108,75%	121,56%	75,33%	72,40%	100,00%
			BA Sumpah Janji			314	210	204	0	652	314	210	204	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	#DIV/0!	0,00%
			SK Pengangkatan PNS			432	206	0	0	652	430	203	0	0	0	99,54%	98,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
9	Adanya data calon Kasek, Pengawas Sekolah dan Penilik PLS		data Calon Kasek, Pengawas Sekolah dan Penilik PLS			610	320	325	0		417	320	0	0	0	68,36%	100,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian, sehingga pengelolaan data dan kinerja berjalan efisien																			
10	Tersedianya data PNS yang akurat melalui aplikasi SIMPEG		modul software SIMPEG dan web portal			1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			server			0	0	0	1	0	0	0	0	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!
			validasi			0	0	9873	10000	10000	0	0	9873	1000	9355	#DIV/0!	#DIV/0!	100,	100,	93,5

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Tar get SP M	Tar get IK K	Tar get Ind ika tor Lain nya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		data PNS												0		/0!	/0!	00%	00%	5%
	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan Tupoksi yang dilaksanakan;																			
11	Terwujudnya Tertib Administrasi Peningkatan Pendidikan Pegawai	SK Tugas Belajar				9	10	6	15	8	9	11	9	14	6	100,00%	110,00%	150,00%	93,33%	75,00%
		SK Izin Belajar				400	150	200	250	150	417	169	217	418	206	104,25%	112,67%	108,50%	167,20%	137,33%
		SK Keterangan Belajar				22	30	40	10	50	26	40	32	61	59	118,18%	133,33%	80,00%	610,00%	118,00%
		SK izin Pengu naan Gelar				300	150	200	150	30	288	134	138	106	25	96,00%	89,33%	69,00%	70,67%	83,33%
12	Meningkatnya wawasan kebangsaan, etika berorganisasi dan pemahaman tupoksi bagi CPNS	CPNS mengik uti diklat prajab				432	206	0	8	652	431	205	0	8	648	99,77%	99,51%	#DIV /0!	100,00%	99,39%
13	Meningkatnya kemampuan kepemimpinan	PNS mengik uti Diklat PIM II				2	2	2	4	2	2	0	2	4	2	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		orang mengik uit Diklat PIM III				0	0	3	5	5	0	0	3	5	6	#DIV /0!	#DIV /0!	100,00%	100,00%	120,00%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Tar get SP M	Tar get IK K	Tar get Ind ika tor Lain nya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			orng mengik uti Diklat PIM IV			0	24	21	11	4	0	21	21	11	5	#DIV /0!	87,5 0%	100, 00%	100, 00%	125, 00%
14	Meningkatnya kapasitas dan kinerja PNS sesuai tupoksi		PNS			94	280	141	370	200	83	287	156	389	284	88,3 0%	102, 50%	110, 64%	105, 14%	142, 00%
	Meningkatkan Pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas, reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai.																			
15	Meningkatnya pengetahuan tentang aturan kepegawaian melalui sosialisasi aturan kepegawaian		PNS			206	118	102	0	0	206	118	102	0	0	100, 00%	100, 00%	100, 00%	#DIV /0!	#DIV /0!
16	Terbinanya kedisiplinan PNS		PNS			0	0	140	130	0	0	0	140	130	0	#DIV /0!	#DIV /0!	100, 00%	100, 00%	#DIV /0!
17	Jumlah personil yang memahami dan mampu mengaplikasikan aturan2 kepegawaian		PNS			76	76	236	180	65	76	76	236	180	65	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%
18	Tersampainya tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya		Tanda kehorm atan Satya Lencana Karya Satya			525	250	200	200	200	513	250	191	379	242	97,7 1%	100, 00%	95,5 0%	189, 50%	121, 00%
19	Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan izin perkawinan dan		kali sidang			10	5	11	11	11	10	5	11	11	11	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Tar get SP M	Tar get IK K	Tar get Ind ika tor Lain nya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	perceraian PNS																			
20	Terwujudnya kesadaran PNS dalam membayar pajak-pajak Pribadi	LP2P				8488	8000	8000	7500	7500	7391	6716	7309	7196	7600	87,08%	83,95%	91,36%	95,95%	101,33%
21	Meningkatnya Disiplin PNS	SKPD				0	12	20	18	8	0	12	20	18	8	#DIV/0!	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22	Terbinanya kedisiplinan PNS	PNS				0	162	0	0	652	0	154	0	0	651	#DIV/0!	95,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	99,85%
23	Tertibnya administrasi UKPPI	PNS				0	0	0	80	0	0	0	0	79	55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98,75%	#DIV/0!
24	Dipahaminya proses penyusunan SKP penilaian prestasi kerja PNS	PNS				0	0	0	90	0	0	0	0	90	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!
		unit kerja				0	0	0	56	56	0	0	0	56	56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%	100,00%
	Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).																			
25	Terwujudnya Tertib Administrasi Kesejahteraan Pegawai	Karpeg				200	300	250	10	10	203	312	259	10	7	101,50%	104,00%	103,60%	100,00%	70,00%
		Karis				100	300	50	80	60	135	329	222	76	57	135,00%	109,67%	444,00%	95,00%	95,00%
		Karsu				100	300	40	50	30	98	324	117	92	35	98,00%	108,00%	292,50%	184,00%	116,67%
		Taspen				100	80	10	3	200	124	83	52	2	240	124,00%	103,75%	520,00%	66,67%	120,00%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Tar get SP M	Tar get IK K	Tar get Ind ika tor Lain nya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KPE				1150	3193	50	150	100	730	3942	38	135	124	63,48%	123,46%	76,00%	90,00%	124,00%
26	Tersusunnya file kepegawaian	file kepegawaian				0	11000	0	0	0	0	10500	0	0	0	#DIV/0!	95,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

#DIV/0! : Dalam tahun berkenaan tidak ada kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sebagaimana kolom 2

Keterangan

Rasio 0,00 % : Capaian pelayanan 0% memiliki kemungkinan:

1. kegiatan dianggarkan akan tetapi batal dilaksanakan (co: seleksi calon kepek, diklat PIM Tk. II, Sumpah Janji PNS) ;
2. kegiatan dilaksanakakan, akan tetapi output masih belum diketahui hingga tahun anggaran berakhir atau terjadi penundaan (co: seleksi CPNS, penyelesaian SK CPNS ke PNS)

Realisasi rendah : Realisasi dibawah 50%, dikarenakan perubahan regulasi yang mengatur pelantikan pejabat struktural/fungsional enam bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir

Secara keseluruhan target pelayanan dapat tercapai. Koordinasi yang baik dengan SKPD lain khususnya, sebagai *beneficiaries* atas pelayanan BKD Kabupaten Blora menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan, mengingat pelayanan kepegawaian merupakan kolektivitas pelayanan secara berjenjang. Dengan didukung komitmen pimpinan dan sumber daya manusia yang relatif muda dan responsif serta sarana dan prasarana yang ada, BKD berkomitmen untuk memberikan kepastian pelayanan. Sementara kendala eksternal yang menjadi faktor dinamis dalam pelayanan adalah perubahan regulasi, mengingat manajemen kepegawaian merupakan mix system antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini diantisipasi oleh BKD Kabupaten Blora dalam setiap kesempatan perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penentuan target akan lebih reliable sehingga pencapaian kinerja pelayanan dalam kriteria baik bahkan sangat baik.

Dalam melaksanakan pelayanan periode Renstra 2011 – 2015, BKD Kabupaten Blora menggunakan anggaran yang sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Blora. Rincian pendanaan Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

NO	Program/ Kegiatan		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angga ran	Realisa si
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Progra m Peningk atan Kapasit as Sumber Daya Aparatu r																		
1		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	1.150.000.000	957.678.000	-	48.000.000	1.300.000.000	1.132.107.750	848.844.650	-	47.713.800	1.276.265.216	98,44%	88,64%	#DIV/0!	99,40%	98,17%	512.006.513	491.841.567
2		Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	70.000.000	469.722.000	460.000.000	575.000.000	360.000.000	70.000.000	340.405.000	459.397.145	554.848.360	356.257.045	100,00%	72,47%	99,87%	96,50%	98,96%	315.597.405	293.119.024
3		Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	150.500.000	416.900.000	510.650.000	1.123.721.000	707.750.000	149.351.000	404.297.800	494.102.900	1.095.474.200	674.126.164	99,24%	96,98%	96,76%	97,49%	95,25%	472.635.885	459.529.305
	Progra m Pembin aan dan Pengem bangan Aparatu r																		
4		Seleksi penerimaan CPNS	40.000.000	45.850.000	500.000.000	531.069.000	300.000.000	39.653.000	39.524.000	325.574.550	483.723.040	211.530.500	99,13%	86,20%	65,11%	91,08%	70,51%	130.742.831	112.532.166
5		Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	150.000.000	190.000.000	190.000.000	197.950.000	99.506.000	148.967.000	169.319.900	183.616.000	196.323.620	98.436.429	99,31%	89,12%	96,64%	99,18%	98,93%	153.926.151	148.587.276

6		Pembangunan / pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah	130.000.000	180.000.000	30.000.000	130.000.000	252.700.000	129.040.000	175.473.750	27.001.100	119.899.460	236.412.720	99,26%	97,49 %	90,00 %	92,23 %	93,55 %	166.510.304	159.168.141
7		Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	66.000.000	146.700.000	34.500.000	22.229.000	25.000.000	65.434.500	145.778.000	30.100.050	21.923.620	23.516.275	99,14%	99,37 %	87,25 %	98,63 %	94,07 %	48.162.442	47.091.757
8		Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	30.000.000	20.000.000	20.000.000	13.000.000	11.000.000	29.622.500	18.913.412	18.392.000	12.048.150	10.535.000	98,74%	94,57 %	91,96 %	92,68 %	95,77 %	17.114.800	16.330.017
9		Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	65.000.000	121.900.000	78.000.000	78.000.000	77.000.000	63.435.500	107.548.627	68.310.235	67.993.550	65.532.237	97,59%	88,23 %	87,58 %	87,17 %	85,11 %	83.056.877	74.253.168
10		Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	17.500.000	23.000.000	12.850.000	25.000.000	26.000.000	17.412.000	18.779.800	10.785.000	22.308.670	8.668.307	99,50%	81,65 %	83,93 %	89,23 %	33,34 %	22.616.209	15.857.579
11		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000	15.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	14.772.500	13.036.991	15.732.500	15.768.000	16.272.783	98,48%	86,91 %	92,54 %	92,75 %	95,72 %	15.968.719	14.909.650
12		Sidang Baperjakat	25.000.000	120.000.000	80.000.000	138.550.000	169.040.000	24.407.500	52.391.000	78.729.600	74.580.220	147.962.754	97,63%	43,66 %	98,41 %	53,83 %	87,53 %	91.554.420	61.289.914
13		Pelantikan pejabat struktural/fungsional	95.000.000	75.000.000	80.000.000	67.374.000	40.000.000	76.106.500	54.292.000	57.256.400	59.814.050	13.831.750	80,11%	72,39 %	71,57 %	88,78 %	34,58 %	66.196.389	42.999.112
14		Penyelesaian administrasi SK CPNS ke PNS	20.000.000	25.000.000	-	-	30.778.000	18.780.000	22.912.150	-	-	29.122.985	93,90%	91,65 %	#DIV/0!	#DIV/0!	94,62 %	24.873.494	23.227.320
15		Seleksi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik pendidikan luar sekolah	385.000.000	241.500.000	300.000.000	-	-	247.960.000	202.731.500	-	-	-	64,41%	83,95 %	0,00 %	#DIV/0!	#DIV/0!	303.272.506	224.208.168
16		Penyelenggaraan Sumpah janji PNS	-	-	25.000.000	-	25.121.000	-	-	23.790.000	-	4.442.500	#DIV/0!	#DIV/0!	95,16 %	#DIV/0!	17,68 %	25.060.427	10.280.422
17		Penyelesaian SK Kartu Istri, Kartu Suami, Kartu Pegawai dan Taspen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	8.500.000	15.000.000	13.946.000	11.925.000	8.925.000	8.123.836	100,00 %	92,97 %	79,50 %	89,25 %	95,57 %	11.759.812	11.097.562

18		Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian dan pensiun PNS	40.000.000	50.000.000	100.000.000	110.000.000	105.858.000	39.875.000	49.797.250	96.880.300	108.682.008	104.221.080	99,69%	99,59%	96,88%	98,80%	98,45%	69.468.287	68.865.994
19		Penyusunan formasi PNS	20.000.000	32.750.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	19.970.000	32.392.000	19.268.850	29.711.500	28.764.200	99,85%	98,91%	96,34%	99,04%	95,88%	27.709.006	27.267.679
20		Pengadaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	17.047.500	13.970.000	13.665.000	14.211.490	14.851.799	85,24%	93,13%	91,10%	94,74%	99,01%	16.118.549	14.973.349
21		Pengakuan Disiplin PNS (Sidak)	-	-	20.000.000	20.000.000	15.000.000	-	-	17.774.806	18.620.000	13.902.651	#DIV/0!	#DIV/0!	88,87%	93,10%	92,68%	18.171.206	16.632.622
22		Pemantapan disiplin	-	-	30.000.000	30.000.000	116.000.000	-	-	29.697.000	29.074.000	115.194.891	#DIV/0!	#DIV/0!	98,99%	96,91%	99,31%	47.086.907	46.332.265
23		Bantuan Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	-	-	-	25.000.000	21.500.000	-	-	-	23.566.790	19.225.802	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	94,27%	89,42%	23.184.046	21.285.921
24		Pemantapan Proses Penilaian Prestasi Kerja PNS	-	-	-	57.000.000	31.500.000	-	-	-	54.468.850	29.109.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	95,56%	92,41%	42.373.341	39.818.761
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
25		Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	7.000.000	5.000.000	1.645.000	930.000	4.661.570	3.097.947	4.153.448	1.236.546	763.686	93,23%	44,26%	83,07%	75,17%	82,12%	2.705.074	1.921.688
26		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	85.000.000	77.230.000	84.300.000	93.300.000	88.000.000	59.247.165	57.305.892	61.572.404	71.884.757	76.127.484	69,70%	74,20%	73,04%	77,05%	86,51%	85.682.537	65.654.014
27		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	7.000.000	921.000	2.583.750	2.611.500	3.108.525	5.041.800	46,05%	86,13%	87,05%	77,71%	72,03%	3.600.206	2.471.226
28		Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.650.000	80.100.000	72.500.000	93.600.000	91.600.000	71.150.000	76.650.000	67.450.000	87.000.000	90.100.000	86,09%	95,69%	93,03%	92,95%	98,36%	86.798.391	80.859.821

29		Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000	3.398.750	4.497.435	5.119.000	4.968.000	5.723.500	42,48%	56,22%	85,32%	82,80%	81,76%	7.200.411	4.565.957
30		Penyediaan alat tulis kantor	21.200.000	25.000.000	18.500.000	23.000.000	22.150.000	18.247.600	24.856.100	17.914.385	22.655.885	21.344.000	86,07%	99,42%	96,83%	98,50%	96,36%	22.795.250	21.640.829
31		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	10.000.000	9.300.000	40.500.000	13.500.000	7.363.050	7.190.000	6.924.300	37.537.700	9.715.000	73,63%	71,90%	74,45%	92,69%	71,96%	15.291.398	11.787.570
32		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	28.000.000	6.000.000	37.500.000	6.000.000	6.000.000	25.758.000	5.299.000	34.661.650	3.827.000	3.378.500	91,99%	88,32%	92,43%	63,78%	56,31%	8.818.667	6.481.449
33		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	68.750.000	73.500.000	30.000.000	171.490.000	57.000.000	66.411.200	71.039.000	28.237.600	163.941.980	55.644.500	96,60%	96,65%	94,13%	95,60%	97,62%	83.833.660	80.995.828
34		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	4.000.000	3.900.000	4.200.000	4.860.000	2.016.000	2.820.000	3.096.000	3.845.000	3.920.000	84,00%	70,50%	79,38%	91,55%	80,66%	3.741.444	3.042.499
35		Penyediaan makanan dan minuman	33.600.000	30.000.000	33.750.000	32.800.000	42.535.000	23.781.500	23.554.500	27.741.500	27.331.500	31.213.000	70,78%	78,52%	82,20%	83,33%	73,38%	34.436.595	26.292.267
36		Rakor dan konsultasi ke luar daerah	70.000.000	89.600.000	120.000.000	80.000.000	96.000.000	59.185.200	53.846.796	75.090.383	56.767.373	76.590.751	84,55%	60,10%	62,58%	70,96%	79,78%	83.308.980	61.011.546
37		Rakor dan konsultasi ke dalam daerah	12.000.000	12.000.000	10.000.000	9.355.000	7.500.000	8.365.000	9.550.047	7.750.040	3.258.110	5.356.075	69,71%	79,58%	77,50%	34,83%	71,41%	10.025.750	6.110.419
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
38		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	69.200.000	383.164.000	-	-	-	65.158.001	375.946.800	-	#DIV/0!	#DIV/0!	94,16%	98,12%	#DIV/0!	162.834.114	156.511.795
39		Pengadaan mebelair	-	69.000.000	20.000.000	25.300.000	-	-	66.919.500	19.110.000	25.146.000	-	#DIV/0!	96,98%	95,55%	99,39%	#DIV/0!	32.683.850	31.800.023
40		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000	85.400.000	117.140.000	195.000.000	50.000.000	59.429.700	84.730.000	116.304.000	194.425.900	49.605.700	99,05%	99,22%	99,29%	99,71%	99,21%	84.072.398	83.479.841
41		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	20.000.000	29.970.000	30.000.000	50.000.000	35.462.000	19.286.008	25.332.113	27.325.272	41.877.155	24.566.595	96,43%	84,52%	91,08%	83,75%	69,28%	32.107.944	26.626.187

		dinas/operasio nal																	
42		Pemeliharaan rutin berkala peralatan Ged. Kantor	5.000.0 00	7.000.0 00	7.750.0 00	13.750. 000	8.750.0 00	2.555.0 00	3.020.0 00	1.985.0 00	10.922. 500	4.363.0 00	51,10%	43,14 %	25,61 %	79,44 %	49,8 6%	8.055. 541	4.379.0 13
43		Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	-	-	3.500.0 00	3.443.0 00	2.000.0 00	-	-	1.370.0 00	3.390.0 00	2.000.0 00	#DIV/0!	#DIV /0!	39,14 %	98,46 %	100, 00%	2.888. 540	2.102.0 84
44		Pembangunan Gedung kantor	-	-	-	-	50.000. 000	-	-	-	-	49.813. 000	#DIV/0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	99,6 3%	50.00 0.000	49.813. 000
	Progra m Peningk atan Kapasit as Sumber Daya Aparatu r																		
45		Sosialisasi peraturan perundang- undangan	30.000. 000	30.000. 000	30.000. 000	-	-	29.477. 000	28.762. 500	28.784. 000	-	-	98,26%	95,88 %	95,95 %	#DIV /0!	#DIV /0!	30.00 0.000	29.005. 945
46		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	40.000. 000	40.000. 000	90.000. 000	74.000. 000	40.000. 000	39.865. 000	37.566. 500	83.467. 200	71.661. 670	39.412. 747	99,66%	93,92 %	92,74 %	96,84 %	98,5 3%	46.65 0.137	45.350. 182
	Progra m Peningk atan Disiplin Aparatu r																		
47		Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu	-	-	-	6.800.0 00	10.550. 000	-	-	-	4.500.0 00	10.530. 000	#DIV/0!	#DIV /0!	#DIV /0!	66,18 %	99,8 1%	8.469. 947	6.883.6 76
	Progra m Peningk atan Kelanca ran Pelayan an dan Adminis trasi Umum																		

48		Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah	1.326.400.000	1.309.200.000	1.364.660.000	1.394.760.000	1.385.910.000	1.315.900.000	1.309.200.000	1.347.660.000	1.394.760.000	1.378.797.500	99,21%	100,00%	98,75%	100,00%	99,49%	1.353.563.876	1.349.140.606
	Program Peningkatan Pengembngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
49		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	-	5.000.000	5.000.000	7.500.000	7.000.000	-	4.880.000	5.000.000	7.485.000	6.970.000	#DIV/0!	97,60%	100,00%	99,80%	99,57%	6.019.007	5.973.152
50		Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja SKPD	-	-	5.000.000	7.500.000	7.000.000	-	-	4.980.000	7.500.000	6.950.000	#DIV/0!	#DIV/0!	99,60%	100,00%	99,29%	6.402.896	6.379.086
51		Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	-	6.000.000	-	-	-	-	5.620.500	-	-	-	#DIV/0!	93,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	6.000.000	5.620.500

Secara umum, anggaran dalam program yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Blora (Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pembinaan dan Pengembangan Apratur) terealisasi baik. Selama kurun waktu lima tahun, hanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang capaian realisasi anggarannya sekitar 43,66% pada taun 2012. Sedangkan karena perubahan kebijakan pada tahun 2013, kegiatan Seleksi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik pendidikan luar sekolah tidak dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Blora, sementara kegiatan telah dianggarkan sehingga realisasi anggaran 0%. Pada Tahun 2015, karena adanya regulasi terkait tidak diperbolehkannya Pelantikan enam bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, maka anggaran dalam kegiatan pelantikan pejabat struktural/fungsional dibawah 50%. Beberapa kegiatan lain yang realisasi anggarannya kurang dari 50% termasuk kegiatan operasional. Hal ini wajar saja mengingat dalam penganggaran terkait operasional relatif flkutuatif, terlebih untuk kegiatan yang bersifat pemeliharaan yang notabene cukup sulit untuk diprediksi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan bidang aparatur dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pembangunan aparatur diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efisien dan produktif, meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan memberikan dukungan bagi peningkatan daya saing nasional, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Renstra BKN Tahun 2015-2019).

Secara konseptual, pembangunan aparatur negara pada Tahun 2015-2019 diorientasikan pada: (a) pemantapan fungsi birokrasi sebagai regulator dan fasilitator pembangunan serta pilar utama pemerintahan, (b) revitalisasi sistem dan manajemen birokrasi publik secara efisien, responsif, dan fokus pada pencapaian kinerja, (c) pengembangan birokrasi yang lincah, inovatif dan adaptif melalui penciptaan tata kelola yang dinamis, (d) pengembangan SDM aparatur sebagai pendorong reformasi; (e) pemantapan peran birokrasi untuk mendukung sinergi, integrasi, dan kolaborasi serta keterpaduan dalam manajemen pembangunan dengan lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan, antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin mutakhir, tatanan globalisasi yang mengarah pada liberalisasi, kompetisi dan integrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas. Dalam RPJMN 2015-2019 bidang aparatur, sasaran utamanya sebagai berikut:

1. **Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel;** ditandai dengan meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensi pengawasan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan kinerja pemerintah; dan meningkatkan transparansi proses pengadaan barang/jasa;
2. **Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien,** ditandai dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi tepat fungsi dan tepat ukuran; terwujudnya bisnis proses yang sederhana dan berbasis TIK; terwujudnya implementasi manajemen ASN berbasis merit; meningkatnya kualitas kebijakan dan kepemimpinan dalam birokrasi; meningkatnya efisiensi

penyelenggaraan birokrasi; dan meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);

3. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, ditandai dengan makin efektifnya penguatan kelembagaan dan tata kelola pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan Rencana Strategis BKN Tahun 2015-2019, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dalam pengembangan pelayanan adalah :

NO	TANTANGAN	PELUANG
1	<i>Mindset</i> aparatur yang belum sepenuhnya menerima <i>sistem meryt</i> sebagai dasar dalam manajemen kepegawaian	Regulasi mengenai manajemen PNS yang mengarah pada <i>sistem meryt</i> telah tersedia
2	Kooptasi dan intervensi politik dalam tubuh birokrasi yang tidak mungkin dihindari	Komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya reformasi birokrasi bidang aparatur
3	Kompetensi aparatur yang belum memadai dibandingkan dengan kompleksitas regulasi dan tuntutan pekerjaan yang dinamis	Meluasnya jejaring media sosial dan komunikasi yang memudahkan transaksi informasi antar kelompok / individu

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian atas pelaksanaan pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang di hadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan:

Tabel 3.1 Permasalahan pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Bidang Pelayanan	Permasalahan
1	Pengadaan Aparatur	Belum optimalnya penghitungn kebutuhan pegawai
		Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah ideal PNS dikarenakan kebijakan instansi pusat
		Belum optimalnya kelayakan dan kepatutan jasmani dan rohani CPNS dalam pelaksanaan tugas
2	Diklat Kepemimpinan	Sulit mencari calon peserta Diklat PIM Tk. II dikarenakan aturan batasan usia
		Masih banyaknya pejabat administrator dan pengawas yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan
3	Diklat Prajabatan	Regulasi diklat prajabatan yang mengatur batas waktu maksimal satu tahun sejak diangkat CPNS wajib mengikuti Diklat berpengaruh terhadap perencanaan dan penganggaran
4	Diklat Teknis	Belum optimalnya perencanaan kediklatan

No	Bidang Pelayanan	Permasalahan
	dan Fungsional	melalui Analisis Kebutuhan Diklat
5	Mutasi Kepangkatan	Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah untuk mengusulkan kenaikan pangkat tepat waktu
6	Pembinaan Pegawai	Masih adanya proses perceraian PNS tidak sesuai mekanisme kepegawaian
		Masih terjadinya pelanggaran disiplin PNS
7	Administrasi kesejahteraan pegawai	Belum terintegrasi menggunakan Teknologi Informasi
		Belum sepenuhnya PNS memiliki Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/KPE
		Jumlah PNS yang menerima penghargaan satya lancana karya satya relatif kecil
		Belum optimalnya pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa purna tugas
8	Penataan Aparatur	Masih adanya <i>gap competency</i> aparatur pemerintah daerah
		Masih adanya intervensi politis dalam penempatan aparatur

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Misi Kabupaten Blora 2016-2021 merupakan perwujudan dari visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu H. Djoko Nugroho dan H. Arief Rohman, M.Si.

Visi Kabupaten Blora 2016 – 2021 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat.”***

Sesuai dengan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Kabupaten Blora 2016 – 2021

yang terkait dengan tupoksi Badan Kepegawaian Daerah adalah ***“Mewujudkan Pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.”***

Terwujudnya pemerintahan yang efektif bersih KKN, dan demokratis, serta melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik harus didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM aparatur) yang profesional, disiplin dan berakuntabilitas sehingga mampu menghasilkan pelayanan prima.

Untuk itu Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah didasarkan untuk memberikan motivasi kepada aparatur agar terwujud SDM aparatur yang profesional, disiplin, berkinerja dan berakuntabilitas sehingga pelayanan publik menjadi prima.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan dan strategi nasional sub bidang aparatur dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang efisien dan produktif adalah:

1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis;
2. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*;
3. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;
4. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
5. Peningkatan kualitas kebijakan publik;

6. Peningkatan kepemimpinan untuk perubahan birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif;
7. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.

Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015-2019, mencakup Pengembangan sistem manajemen kepegawaian, penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian, pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi dan mutasi kepegawaian, penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian, melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Kepegawaian Negara.

Dengan memperhatikan tercapainya keselarasan pada format dan sistematika penyusunan renstra kementerian dan lembaga secara nasional, maka Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015-2019, disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Dengan demikian seluruh instansi pemerintah baik Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah mempunyai format dan sistematika yang sama dalam susunan renstra tahun 2015-2019.

Pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah, Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah :

1. Meningkatnya sistem pola karier yang jelas dan terukur ;
2. Meningkatnya pelayanan manajemen mutasi kepegawaian ;
3. Meningkatnya kinerja PNS yang berbasis kompetensi ;

4. Menurunnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS dan meningkatnya kesejahteraan PNS ;
5. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian ;
6. Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan cukup signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusannya kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis bidang kepegawaian dapat disimpulkan secara *bottom up*, dengan memperhatikan kondisi empiris permasalahan pelayanan, dan *top down* dengan meratifikasi isu nasional. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis BKD Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021 adalah:

1. Jumlah aparatur yang belum mencukupi;
2. Masih adanya *gap competency* aparatur;

3. Masih adanya resistensi terhadap transformasi manajemen kepegawaian dengan sistem merit;
4. Perlunya penyederhanaan pelayanan memanfaatkan teknologi informasi dengan pengendalian belanja modal sarana dan prasarana TI yang terukur;
5. Pentingnya pembinaan dan penegakan disiplin aparatur secara berkelanjutan dengan mengedepankan cara preventif;
6. Perlunya peningkatan akuntabilitas kinerja BKD Kabupaten Blora;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021 adalah: “Meningkatkan kapasitas, kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara dan Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat”.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi;
2. Meningkatnya disiplin sumber daya Aparatur;
3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
4. Meningkatnya ketertiban data administrasi kepegawaian;
5. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan internal BKD Kabupaten Blora.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2016 - 2021					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan kapasitas, kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara dan Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat		Indeks Profesionalitas PNS	70%	73%	75%	77%	80%	83%
		Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi	51,60%	51,73%	52,16%	52,76%	55,48%	57,60%
			Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	200	255	220	220	220	220
			Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur (komulatif)	70,00%	68,72%	68,72%	68,72%	68,72%	68,72%

		Meningkatnya disiplin sumber daya Aparatur	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan masyarakat / penerima layanan administrasi kepegawaian (non kumulatif)	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya ketertiban data administrasi kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian (non kumulatif)	80%	80%	82,5%	85%	87,5%	90%
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan internal BKD Kabupaten Blora	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (non kumulatif)	CC	CC	CC	CC	CC	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2016-2021 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan BKD Kabupaten Blora dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2017 - 2021

VISI :	“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat.”		
MISI I	Mewujudkan pemerintahan yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas, kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara dan Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta sosialisasi peraturan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat pimpinan bagi pejabat struktural;
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur;
			Melakukan fasilitasi kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian

VISI :	“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat.”		
MISI I	Mewujudkan pemerintahan yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya disiplin sumber daya Aparatur	Mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam menangani penyelesaian permasalahan kepegawaian dan melaksanakan pembinaan kepegawaian	Membentuk dan memaksimalkan kinerja Tim penanganan dan penyelesaian kasus-kasus Kepegawaian serta meningkatkan pembinaan kepegawaian
			Membentuk dan memaksimalkan Tim Penegak Disiplin
	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Optimalisasi kinerja petugas yang menangani Mutasi dan Pensiun	memaksimalkan kinerja staf berdasarkan analisa jabatan masing2 dan sering melaksanakan koordinasi dengan BKD Prov, BKN Regional dan BKN Pusat
		Optimalisasi kinerja petugas yang menangani Kenaikan Pangkat	memaksimalkan kinerja staf berdasarkan analisa jabatan masing2 dan sering melaksanakan koordinasi dengan BKD Prov, BKN Regional dan BKN Pusat
	Meningkatnya ketertiban data administrasi kepegawaian	Optimalisasi updating data kepegawaian	Memenuhi pengadaan sarana prasarana SIMPEG dan menyusun Tim Updating Data Kepegawaian

VISI :	“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat.”		
MISI I	Mewujudkan pemerintahan yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan internal BKD Kabupaten Blora	Menyusun dan melaporkan dokumen2 perencanaan, penganggaran, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai aturan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu	Internalisasi konsep akuntabilitas dan kinerja berbasis hasil

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya dijabarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan Kelompok Sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora secara rinci tersajikan dalam tabel 6.1:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara dan Mewujudkan etos kerja tinggi etos pengelola an administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat	Terpenuhi nya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi			Indeks Profesionalitas PNS	%		70		73		75		77		80		83,0		83			
				Persentase pemenuhan kebutuhan Aparatur	%		70		68,72		68,72		68,72		68,72		68,72					
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase keterisian formasi CPNS sesuai bidang dan kompetensi	%		100	977.060.000	100	1.169.911.000	100	825.000.000	100	678.000.000	100	600.000.000	100	684.000.000	100	4.933.971.000	
				Penyusunan Formasi PNS	Jumlah usulan formasi CPNS	formasi		383	38.560.000	389	75.000.000	436	75.000.000								1.208	188.560.000
				Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah penambahan CPNS sesuai bidang dan kompetensi	formasi		383	898.500.000	389	1.054.911.000	300	700.000.000								1.072	2.653.411.000
				Penyelesaian Administrasi SK CPNS ke PNS	Jumlah SK CPNS ke PNS yang terselesaikan	dokumen		45	10.000.000	383	20.000.000	389	25.000.000								817	55.000.000
				Penyelenggaraan sumpah janji PNS	Jumlah Berita Acara Sumpah Janji PNS	dokumen		664	30.000.000	383	20.000.000	389	25.000.000								1.436	75.000.000
				Pengadaan Aparatur Sipil Negara* (simplifikasi nomenklatur kegiatan)	Jumlah dokumen usulan kebutuhan formasi CPNS	dokumen									1	678.000.000	1	600.000.000	1	684.000.000	3	1.962.000.000
					Persentase keterisian formasi CPNS sesuai bidang dan kompetensi	%									100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase SK CPNS ke PNS yang terselesaikan	%								100		100		100		100	
				Persentase Sumpah Janji PNS terselesaikan	%								100		100		100		100	
				Persentase Pejabat yang sesuai dengan kompetensi	%		51,60		51,73		52,16		52,76		55,48		57,6		57,6	
			Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural yang lulus diklat PIM II, III dan IV	%		100	618.000.000	100	650.000.000	100	2.033.500.000	100	600.000.000	100	500.000.000	100	710.000.000	100	5.111.500.000
			Diklat Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah peserta Diklat PIM Tk. II	orang		1	618.000.000	1	650.000.000	3	2.033.500.000	1	600.000.000	1	500.000.000	2	710.000.000	9	5.111.500.000
				Jumlah peserta Diklat PIM Tk. III	orang		2		2		10		3		2		3		22	
				Jumlah peserta Diklat PIM Tk. IV	orang		15		15		50		15		15		15		125	
				Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	orang		200		255		220		220		220		220		1335	
			Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peserta Diklat Teknis Fungsional yang lulus minimal dengan kategori Baik	%		100	418.000.000	100	500.000.000	100	900.000.000	100	500.000.000	100	250.000.000	100	500.000.000	100	3.068.000.000
			Diklat Teknis Fungsional bagi PNSD	Jumlah peserta Diklat Teknis Fungsional	orang		200	418.000.000	243	500.000.000	100	900.000.000							543	1.818.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah pengiriman peserta Diklat Fungsional	orang								20	100.000.000	20	50.000.000	20	100.000.000	60	250.000.000	
				Jumlah peserta penyelenggaraan diklat fungsional	orang								40		40		40		120		
			Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah pengiriman peserta Diklat Teknis	orang								100	400.000.000	50	200.000.000	100	400.000.000	250	1.000.000.000	
				Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat Teknis	orang								100		100		100		300		
			Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peserta Diklat Prajabatan yang lulus minimal dengan kategori Baik	%			-	100	1.505.260.000	100		-	100	1.945.000.000	100	2.195.000.000	100	1.800.000.000	100	7.445.260.000
			Diklat Prajabatan bagi CPNSD	Jumlah peserta Diklat Prajabatan	orang		-	-	186	1.505.260.000	-	-	120	1.945.000.000	120	2.195.000.000	120	1.800.000.000	546	7.445.260.000	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase usulan aparatur yang akan melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi (komulatif)	%		3,78%	65.000.000	2,91%	123.665.000	2,66%	320.000.000	2,68%	300.000.000	2,74%	350.000.000	2,80%	360.000.000	17,90%	1.518.665.000	
			Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar	Jumlah usulan Tugas Belajar dan Izin Belajar yang terselesaikan	dokumen		325	65.000.000	250	123.665.000	218	320.000.000	220	300.000.000	225	350.000.000	230	360.000.000	1.468	1.518.665.000	
				Persentase penyelesaian usulan tugas belajar dan izin belajar	%								100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah peserta tugas belajar calon dokter spesialis atas biaya Pemerintah Daerah	orang				2		2		2		2		2		2	
			Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Sosialisasi Peraturan Per-UU-an	%		0	-	6,67%	18.780.000	0	-	5,18%	40.000.000	5,18%	45.000.000	5,18%	45.000.000	22,12%	148.780.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Per-UU-an	orang		-	-	56	18.780.000	-	-	44	40.000.000	44	45.000.000	44	45.000.000	188	148.780.000
			Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an	%		0	63.800.000	6,59%	39.460.000	5,88%	31.500.000	5,88%	40.000.000	5,88%	45.000.000	5,88%	50.000.000	30,12%	269.760.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an	orang		-	63.800.000	56	39.460.000	50	31.500.000	50	40.000.000	50	45.000.000	50	50.000.000	256	269.760.000
	Meningkatnya disiplin sumber daya Aparatur			Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	%		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin PNS	%		0,40	102.900.000	0,38	234.010.000	0,36	180.000.000	0,34	200.000.000	0,32	200.000.000	0,30	200.000.000	0,30	1.116.910.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah keputusan Bupati ttg penyelesaian kasus kepegawaian	dokumen		6	76.800.000	6	102.280.000									12	179.080.000
				Jumlah keputusan Bupati ttg izin perceraian PNS	dokumen		6		6											-
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah LP2P yang dilaporkan	dokumen		7000	11.800.000											7.000	11.800.000
			Penegakan Disiplin PNS (Sidak)	Jumlah SKPD yang disidak	SKPD		12	14.300.000	12	24.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24	38.760.000
			Pemantapan Disiplin PNS	Jumlah CPNS yang mengikuti pemantapan disiplin	orang		0		195	50.110.000	-									50.110.000
			Pemantapan Proses Penilaian Prestasi Kerja PNS	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti pemantapan	orang		0		150	57.160.000	-	-							150	57.160.000
			Pembinaan dan Peningkatan Disiplin PNS * (simplifikasi nomenklatur kegiatan)	Persentase penyelesaian kasus kepegawaian	%			-		-	100	180.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	780.000.000
				Jumlah SKPD yang disidak	SKPD						16		16		16		16		64	
				Jumlah pejabat struktural yang mengikuti pemantapan penilaian SKP	orang						67		67		67		67		268	
				Jumlah SKPD yang dimonitoring terkait Penilaian Prestasi Kerja PNS	SKPD						44		44		44		44		176	
				Jumlah CPNS yang mengikuti pemantapan disiplin	orang								250		250		250		750	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian			Indeks kepuasan masyarakat / penerima layanan administrasi kepegawaian (non kumulatif)	%		90		90		90		90		90		90		90		
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase layanan administrasi mutasi dan karier PNS yang terselesaikan tepat waktu	%		100	102.000.000	100	168.185.000	100	142.000.000	100	200.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	912.185.000	
			Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah keputusan kenaikan pangkat terselesaikan	dokumen		1500	80.000.000	975	123.665.000	1800	100.000.000								4.275	303.665.000
			Bantuan Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Jumlah peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas	orang		105	22.000.000	300	44.520.000	200	42.000.000								605	108.520.000
			Penyelenggaraan Administrasi Mutasi Kepangkatan *(simplifikasi nomenklatur kegiatan)	Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat PNS	%								95	200.000.000	95	150.000.000	95	150.000.000	95	500.000.000	
				Jumlah peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas	orang								100		100		100		300	-	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penyelesaian administrasi pemindahan dan pemberhentian pegawai (non kumulatif)	%		100	86.000.000	100	112.700.000	100	75.000.000	100	150.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	623.700.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian, dan pensiun PNS	Jumlah berkas pemindahan dan pemberhentian yang terselesaikan	dokumen		650	86.000.000	600	112.700.000	700	75.000.000							1.950	273.700.000
			Penyelenggaraan Administrasi Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Jumlah usulan pemindahan dan pemberhentian yang terselesaikan	dokumen								700	150.000.000	700	100.000.000	700	100.000.000	2.100	350.000.000
			Program Pembinaan dan Pengembangan	Persentase keterisian jabatan (non kumulatif)	%		95	480.000.000	95	506.774.000	95	559.000.000	95	400.000.000	95	600.000.000	95	600.000.000	95	3.145.774.000
			Sidang Baperjakat	Jumlah sidang Baperjakat	kali		10	400.000.000	12	353.780.000									22	753.780.000
			Pelantikan pejabat struktural/fungsional	Jumlah pejabat dilantik	orang		400	80.000.000	400	139.374.000									800	219.374.000
			Penyelesaian administrasi jabatan fungsional	Jumlah keputusan pengangkatan pejabat fungsional	dokumen		0	-	400	13.620.000	0	-	-	-	-	-	-	-	400	13.620.000
			Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan* (simplifikasi nomenklatur kegiatan)	Jumlah sidang Tim Penilai Kinerja PNS	kali						10	559.000.000	10	400.000.000	10	600.000.000	10	600.000.000	40	2.159.000.000
				Jumlah calon JPT / JPT yang mengikuti penilaian kompetensi	orang						2		5		5		5		17	
				Jumlah pelantikan pejabat Administrasi/fungsional	kali						12		12		12		12		48	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah keputusan mutasi jabatan fungsional	dokumen						35			200		200		200		635	
				Jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan	orang						456			450		450		450		1.806	
				Jumlah PNS potensial yang mengikuti penilaian kompetensi	orang						0			20		30		40		90	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai (non kumulatif)	%		100	28.300.000	100	37.035.000	100	30.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	695.335.000	
			Penyelesaian kartu istri, kartu suami, kartu pegawai, kartu peserta taspen	jumlah karis, karsu, karpeg, taspen yang terealisasi	dokumen		891	10.850.000	220	9.050.000	130	20.000.000								1.241	39.900.000
			Penyediaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	jumlah kpe yang terealisasi	dokumen		100	11.850.000	100	18.385.000	100	-								300	30.235.000
			Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi	jumlah penghargaan satya lencana karya satya terealisasi	dokumen		200	5.600.000	200	9.600.000	200	10.000.000	-		-			-		600	25.200.000
			Pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai* (simplifikasi nomenklatur kegiatan)	Persentase usulan karis, karsu, karpeg, kpe dan taspen yang terselesaikan	%									100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000
				Persentase usulan penghargaan satya lencana karya satya yang terselesaikan	%									100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase usulan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terselesaikan	%								100		100		100		100	
				Jumlah peserta pembekalan pra purna bhakti PNS	orang								80		80		80		240	
	Meningkatnya akurasi data kepegawaian			Persentase akurasi data kepegawaian	%		80		80		82,5		85		87,5		90		90	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase updating data kepegawaian	%		100	146.012.000	100	160.720.000	100	134.000.000	100	150.000.000	100	129.000.000	100	100.000.000	100	819.732.000
			pembangunan/pengembangan Sistem Informasi manajemen kepegawaian	Jumlah aplikasi layanan administrasi kepegawaian	buah		0	146.012.000	1	160.720.000	1	100.000.000							2	406.732.000
				Jumlah data kepegawaian yang terupdate	buah		10.000		9.500		8.200								7.400	-
			Penataan File Kepegawaian	Jumlah file kepegawaian yang tertata	buah		10.000		9.500		8.200	34.000.000		-		-		-	7.400	34.000.000
			Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi layanan administrasi kepegawaian	buah								1	150.000.000	1	129.000.000	1	100.000.000	3	379.000.000
				Jumlah data kepegawaian yang terupdate	buah								7.900		7.650		7400			
				Jumlah file kepegawaian yang tertata	buah								7.900		7.650		7400			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah			Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD			CC		CC		CC		CC		CC		B		B	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		100	487.005.000	100	920.600.000	100	979.100.000	100	1.159.150.000	100	1.166.150.000	100	1.215.200.000	100	5.927.205.000
			Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	%		100	1.050.000	100	1.100.000	100	1.100.000	100	1.150.000	100	1.150.000	100	1.200.000	100	6.750.000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	%		100	94.200.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	749.200.000
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%		100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	90.000.000
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	%		100	6.700.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	44.700.000
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	%		100	90.970.000	100	96.000.000	100	102.000.000	100	102.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	610.970.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	%		100	-	100	-	100	150.000.000	100	205.000.000	100	205.000.000	100	210.000.000	100	770.000.000
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Persentase pemenuhan jasa perbaikan peralatan kerja	%		-	-	-	-	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	60.000.000
			Penyediaan alat tulis kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	%		100	22.105.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	552.105.000
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	%		100	11.365.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	13.000.000	100	14.000.000	100	15.000.000	100	77.365.000
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%		100	7.000.000	100	150.000.000	100	15.000.000	100	15.500.000	100	16.000.000	100	16.500.000	100	220.000.000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	%		0	0	100	120.000.000	100	120.000.000	100	100.000.000	100	75.000.000	100	105.000.000	100	520.000.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%		100	4.680.000	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	6.500.000	100	7.000.000	100	34.680.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyediaan makanan dan minuman	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	%		100	25.935.000	100	27.000.000	100	28.000.000	100	29.000.000	100	30.000.000	100	31.000.000	100	170.935.000
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga	%		0	0	100	47.500.000	100	47.500.000	100	47.500.000	100	47.500.000	100	47.500.000	100	237.500.000
			Rakor dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	%		90	200.000.000	90	200.000.000	90	210.000.000	90	220.000.000	90	230.000.000	90	240.000.000	90	1.300.000.000
			Rakor dan konsultasi ke dalam daerah	Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	%		90	8.000.000	90	15.000.000	90	16.000.000	90	17.000.000	90	18.000.000	90	19.000.000	90	93.000.000
			Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	%		0	-		-	0	-	100	130.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	100	390.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%		70	373.050.000	74	1.168.150.000	80	822.500.000	83	535.000.000	85	766.000.000	90	408.500.000	90	4.073.200.000
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	unit		0	-	1	735.650.000	1	450.000.000	1	50.000.000	0	-	0	-	3	1.235.650.000
			Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	%		100	90.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	580.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	%		100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	360.000.000
			Pengadaan mebelair	Persentase pemenuhan mebelair	%		100	60.500.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	90.000.000	100	70.000.000	100	60.000.000	100	400.500.000
			Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	%		0	-	0	-	0	-	70	50.000.000	75	50.000.000	0	-	75	100.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	%		80	90.000.000	82	90.000.000	84	90.000.000	86	120.000.000	88	120.000.000	90	120.000.000	90	630.000.000
			Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon	Persentase pemenuhan instalasi air, listrik dan telepon yang terpasang	%		0	-	100	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	100	75.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	%		100	44.700.000	100	45.000.000	100	47.500.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	52.500.000	100	289.700.000
			Pemeliharaan rutin berkala peralatan Ged. Kantor	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	%		100	10.500.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	16.000.000	100	16.000.000	100	85.000.000
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit		1	17.350.000	0	-	0	-	0	-	1	300.000.000	0	-	2	317.350.000
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	%		90	13.200.000	90	13.500.000	90	13.500.000	90	22.500.000	90	13.500.000	90	13.500.000	90	89.700.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	buah		92	13.200.000	92	13.500.000	92	13.500.000	92	22.500.000	92	13.500.000	92	13.500.000	92	89.700.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDA internal	%		50	-	55	58.000.000	60	45.000.000	65	50.000.000	70	50.000.000	75	50.000.000	75	253.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta diklat formal yang terkirim	orang		0	-	5	15.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	92	15.000.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang		0	-	0	-	0	-	45	50.000.000	45	50.000.000	45	50.000.000	135	150.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta BinteK Peraturan Per-Uu-an	orang		0	-	56	43.000.000	44	45.000.000	0	-	0	-	0	-	90	88.000.000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	%		100	0	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	175.000.000
				Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)			CC		CC		B		B		B		B		B	
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	dokumen		1	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	50.000.000
			Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA-SKPD	dokumen		2	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	12	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	dokumen		3	0	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	18	37.500.000
			Penyusunan LAKIP dan penyusunan LKPJ SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD	dokumen		2	0	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	12	37.500.000
JUMLAH								3.947.127.000		7.354.470.000		7.076.600.000		7.107.150.000		7.301.150.000		7.127.700.000		39.914.197.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai suatu dokumen perencanaan yang hierarkis dan integratif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Rencana Strategis Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD.

Pencapaian indikator dalam RPJMD harus bisa dijabarkan dalam indikator-indikator lain yang bersifat lebih teknis di tingkat perangkat daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai target dalam RPJMD, disusun indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan penunjang pemerintahan, khususnya terkait dengan kepegawaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	200	255	220	220	220	220	
	- Pengiriman Diklat Teknis Fungsional	120	60	110	140	140	110	680
	- Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	40	40	40	40	40	40	240
	- Diklat Pengadaan Barang/ Jasa		30	30				60
	- Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah		45					45
	- Diklat Intel penyidik bagi PNS							0
	- Diklat PPHP							0
	- Diklat PBB	25						25
	- Diklat Penyusunan HPS, Spesifikasi dan Dokumen Kontrak	15					30	45
	- Diklat ESQ		40	40		40		120
	- Diklat SAKIP		40				40	80
- Diklat Pelayanan Prima				40			40	
2	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan							
	- PIM II	2	3	3	3	4	4	17
	- PIM III	5	7	10	15	15	17	64
	- PIM IV	30	30	30	30	30	30	150

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah ASN yang Pindah Tugas dan Pensiun							
	- Pindah Tugas	100	200	200	200	150	100	850
	- Pensiun	400	400	400	400	400	400	2000

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora yaitu tahun 2016-2021. Pada saat Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Rencana Stretegis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 agar dapat berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.

2. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

